

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia pertelevisian Indonesia kian berkembang dengan tumbuhnya berbagai stasiun televisi mulai dari tingkat regional sampai nasional yang saling bersaing memenuhi ruang publik. Ketika stasiun swasta berlomba dalam meningkatkan *rating* melalui program-program yang varatif dan kreatif, disisi lain Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai televisi nasional milik negara dituntut agar tetap konsisten sebagai televisi yang menyediakan siaran netral dalam mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan publik. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 PP No.13 tahun 2005 tentang LPP TVRI, bahwa TVRI memiliki tugas sebagai lembaga yang bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berlandaskan pada tujuan sebagai penyedia layanan publik, maka ruang gerak TVRI jauh berbeda dengan stasiun-stasiun televisi lainnya. TVRI tidak berpikir pada orientasi keuntungan (*profit*) semata, tetapi turut berkonstribusi dalam memupuk cinta tanah air di tengah keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam jalinan kesatuan persatuan (Bhineka Tunggal Ika) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap mengutamakan serta memperhatikan kebutuhan publik. Adanya perubahan status hukum TVRI

menjadi LPP (Lembaga Penyiaran Publik), akan menjadi penyeimbang di tengah dunia pertelevision. Dengan kata lain, TVRI diharapkan menjadi stasiun televisi yang tidak hanya mengejar kebutuhan pasar, tapi mempertimbangkan kualitas siaran dalam upaya pencerdasan dan pemenuhan informasi publik.

Kedudukan LPP TVRI ditegaskan dengan kelahiran UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menjadikan status TVRI berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) atau Televisi Publik pada tanggal 24 Agustus 2006 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun TVRI ke-44. Keberadaan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) diatur tersendiri dalam PP No. 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI. Status TVRI sebagai LPP merupakan perubahan yang ke-4 kalinya, terhitung mulai dari berstatus sebagai Yayasan TVRI, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dibawah Departemen Penerangan, Perusahaan Jawatan (Perjan), Perseroan Terbatas (PT) sampai menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

Perubahan status TVRI dari masa ke masa ternyata berdampak pada dinamika kinerja, khususnya terkait arah kerja, kualitas penyiaran dan orientasi nilai yang dibangun. Semenjak dibentuk dan memasuki masa orde baru, yakni saat masih berstatus sebagai Yayasan dan UPT dibawah Departemen Penerangan, dominasi dinamika penyiaran TVRI berdasarkan kekuasaan pemerintah melalui Departemen Penerangan, mulai dari perencanaan sampai output siaran dikemas dalam kendali pemerintah. Muatan-muatan kritis yang berasal dari masyarakat sipil tidak terwadahi karena dianggap tidak sejalan dengan agenda pemerintah. Pada periode ini, kinerja TVRI banyak dikendalikan dan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah tanpa memperhatikan dan melibatkan kebutuhan publik.

Selanjutnya, memasuki era reformasi tahun 1999, dengan perubahan TVRI menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) untuk pertama kali dimunculkan istilah “penyiaran publik” yang diartikan sebagai penyiaran untuk mewadahi kepentingan publik sebagai corong pemerintah, ketimbang sebagai media penyiaran yang benar-benar memperjuangkan dan membela kepentingan publik. Kondisi ini masih belum banyak berubah karena masih terdapat dominasi pemerintah dalam campur tangan terhadap keberadaan siaran, sehingga tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat dan masih jadi sarana kekuasaan bagi pemerintah. Perubahan status terjadi kembali terhitung tanggal 15 April 2003, mengubah status badan hukum TVRI menjadi Perseroan Terbatas (PT) yakni kinerja TVRI diarahkan mencari laba sehingga kebijakan operasional institusi bersifat komersial dalam siaran. Kondisi yang berdampak pada orientasi siaran yang bernilai komersil dan cenderung terus mengarah pada ideologi kapitalisme.

Pasca reformasi, dengan diposisikan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) melalui amanah Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, TVRI berfungsi melayani kepentingan masyarakat, menjadi media diskursus publik yang demokratis, aktif mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik serta bebas dari intervensi politik kekuasaan dan dominasi kapitalisme. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.13 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, control dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggarana penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara

Kekuasaan Republik Indonesia (NKRI) dengan keutamaan nilai dasar : netral, independen dan tidak komersial.

Banyak harapan diberikan terhadap keberadaan dan kinerja TVRI sebagai LPP, termasuk yang disampaikan oleh Presiden RI sekaligus penanggungjawab TVRI, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam peringatan 50 tahun TVRI menyatakan bahwa:

“Pemerintah mendukung pergerakan TVRI menuju arah barunya Sebagai garda depan transformasi Indonesia. Tegasnya, mengambil posisi sebagai agen pembangunan dan menjaga keseimbangan dalam penyampaian informasi pada masyarakat. Perlunya mengembalikan lembaga penyiaran sebagai medium peradaban. Tak semata - mata sebagai institusi bisnis. TVRI harus cukup arif memposisikan diri sebagai pemelihara keseimbangan dinamika masyarakat. Penguat utama konsolidasi dan transformasi demokrasi melalui politik penyelenggaraan penyiaran yang adil dan berimbang. Posisi ini tidak menuntut TVRI menjadi corong pemerintah. TVRI harus terbuka, konstruktif, solutif, dan edukatif dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat.” (<http://www.bisnisaceh.com/artikel/arах-baru-tvri/index.php>, diakses pada tanggal 27 Maret 2014)

Pernyataan diatas menjadi salah satu gambaran terhadap TVRI yang diharapkan dapat menjadi pelopor lembaga penyiaran televisi di Indonesia, yakni sebagai penyaring, pengontrol dan penyeimbang sebagaimana dalam pasal 3 ayat 1 PP No. 13 tahun 2005 tentang LPP TVRI, yakni TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial. Kondisi yang berbeda jika dibandingkan dengan Stasiun-stasiun Televisi Swasta yang lebih mengutamakan keuntungan semata, yakni mengutamakan “kulit” (acara) hanya untuk menaikkan *rating* dan menarik minat penonton tanpa memperhatikan “isi” (konten) sesuai kebutuhan.

Kondisi ideal TVRI sebagaimana dijamin produk hukumnya ternyata tidak sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai. Walau kini TVRI berupaya untuk memenuhi dan mengutamakan kepentingan publik, ternyata tujuan tersebut belum dapat tercapai salah satunya dikarenakan kondisi TVRI sedang mengalami persoalan antar struktur lembaga, yang berdampak pada persoalan anggaran dan pada akhirnya berpengaruh pada kinerja TVRI berupa kualitas siaran yang tidak sesuai dengan harapan. Secara luas, persoalan yang kini dihadapi TVRI menyangkut terkait persoalan internal dan eksternal yang dapat mengganggu dan berdampak pada keberlangsungan kinerja TVRI sebagaimana yang tertuang pada latar belakang Kebijakan LPP TVRI 2011-2016 dalam Peraturan Dewan Pengawas LPP TVRI No: 01/PRTR/ DEWAS-TVRI/ 2012:

Meski telah berusia 50 (lima puluh) tahun, namun sebagai televisi publik, TVRI baru memasuki periode 5 (lima) tahunan kedua. Saat ini, TVRI masih mengalami kendala internal yang cukup berat, mencakup kelembagaan dan sumber daya; utamanya sumber daya manusia, infrastruktur dan teknologi penyiaran, sarana dan prasarana, budaya organisasi, keuangan, data dan informasi, jejaring kerja, dan citra lembaga. Selain itu, pada saat bersamaan TVRI dihadapkan pada tantangan eksternal yang berdampak signifikan dan perlu mendapat perhatian khusus (2012: 2).

Persoalan diatas berdampak pada kurang diminati TVRI sebagai salah satu media siaran yang menjadi rujukan bagi masyarakat. Kondisi yang berbeda jika dibandingkan dengan TV publik di luar negeri yang lebih berkembang dan sangat diminati masyarakat, seperti BBC (Inggris), CCTV (China), atau NHK (Jepang) yang lebih berkembang dengan terdapatnya beberapa stasiun siaran dengan memiliki karakteristik konten (*genre*) tersendiri guna memenuhi ruang-ruang kebutuhan publik. Masyarakat indonesia lebih memilih stasiun TV swasta yang

memiliki siaran lebih variatif dan dianggap lebih memenuhi kebutuhan publik. Padahal, keberadaan yang demikian sebenarnya sangat dikhawatikan, yakni seharusnya TVRI sudah berperan menjadi jembatan atas informasi yang baik, mendidik dan informatif serta menghindarkan dari nilai-nilai dan pengaruh yang tidak baik bagi masyarakat belum tercapai. Perlu diingat betapa keberadaan televisi tidak hanya sekedar *tontonan* tapi dapat menjadi *tuntunan*.

Upaya melihat kinerja TVRI di dunia pertelevisian dalam memberikan pelayanan publik, adalah salah satu tolok ukur untuk menilai keberadaan TVRI telah memiliki kebermanfaatan dalam menjalankan peran sebagai televisi negara (publik). Status hukumnya sebagai LPP (Lembaga Penyiaran Publik) menjadi arahan bahwa keberadaan tersebut harus terlaksana untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Persoalan kinerja bukan sekedar hasil ataupun capaian kerja semata, tapi termasuk proses yang dapat memberi pengaruh dalam pencapaian kerja, salah satunya berupa iklim komunikasi. Jika dikaitkan dengan persoalan kinerja yang dihadapi TVRI saat ini, iklim komunikasi yang tercipta tidak terjalin dengan baik dan sehat. Kondisi yang dapat dibuktikan dengan terjadinya peristiwa “komunikasi yang tidak sesuai prosedur dan aturan” antara Pihak Direksi dan Dewas (Dewan Pengawas) TVRI hingga Komisi I DPR RI pada tahun 2013 kemarin dan menyebabkan munculnya persoalan baru yang dihadapi TVRI pada tahun 2014. Persoalan ini berdampak pada anggaran TVRI tahun 2014, yang merupakan denyut dan roda keberlangsungan siaran. LPP TVRI terancam tidak siaran, dikarenakan kurang anggaran.

Persoalan yang terjadi tersebut berawal dari penayangan Konvensi Partai Demokrat selama 2 jam 23 menit di TVRI pada 15 September 2013 yang telah menyalahi fungsi dan sifat TVRI sebagai televisi publik. Persoalan ini merupakan muara dari permasalahan antara Direksi dengan Dewas TVRI sebelumnya ditambah beberapa persoalan lain terkait kinerja yang dilakukan Direksi TVRI, berupa kesewenangan Pihak Direksi tanpa sepengetahuan dan proses pertimbangan Dewas dalam memutuskan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan komunikasi yang tidak berjalan sehat dan turut berdampak pada kinerja pegawai dalam lingkup LPP TVRI.

Berdasarkan Kebijakan LPP TVRI tahun 2011-2016, salah satu faktor yang memunculkan kendala internal dan menyebabkan terganggunya kinerja TVRI, adalah persoalan sumber daya manusia (SDM). Para pegawai masih dianggap belum bekerja “lebih” dari target dan tujuan. Artinya, pegawai masih bekerja seadanya selama masih sesuai standar prosedur yang diharapkan. Kondisi ini bisa disebabkan karena faktor keberadaan mereka pada lembaga publik, yakni salah satunya berupa persoalan kompensasi atau gaji yang menjadi salah satu motivasi, sudah terjamin oleh negara. Pada akhirnya, inilah yang menyebabkan TVRI belum dapat menyajikan siaran yang menarik dan diminati masyarakat.

Para pegawai belum dapat bekerja dengan menunjukkan kualitas yang diharapkan. Sebagaimana dikutip dalam salah satu portal berita digital bahwa motor penggerak atau awak media yang menukangi TVRI dinilai kurang dapat bersaing di bidang penyiaran yang *notabene* memerlukan kreativitas tingkat tinggi, dan akhirnya TVRI dinilai gagal bersaing di era global seperti TV-TV

“plat merah” lainnya di berbagai negara sukses bersaing di era global seperti NHK Jepang, BBC Inggris, ABC Australia dan RTM Malaysia (<http://www.tribunnews.com/tribunners / 2014 / 02 / 06 / ruwetnya - persoalan - tvri, diakses pada tanggal 5 Maret 2014>). Artinya, pegawai LPP TVRI belum dapat bekerja secara profesional, yakni berdedikasi lebih terhadap profesi di tengah keberadaan mereka dalam lembaga publik. Padahal, tingkat profesionalisme kerja dalam peningkatan kinerja lembaga pelayanan publik sangat diperlukan. Profesionalisme kerja akan membentuk kinerja pelayanan yang optimal sesuai dengan kondisi yang terjadi. Ini merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi penulis untuk melihat pengaruh profesionalisme kerja terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI.

Adanya persoalan profesionalisme kerja dan iklim komunikasi Kinerja yang muncul dalam LPP TVRI merupakan gambaran bahwa terdapatnya persoalan yang berpengaruh terhadap kinerja. Dalam penelitian ini, profesionalisme kerja mewakili faktor internal dan iklim komunikasi organisasi mewakili faktor ekternal yang mempengaruhi kinerja pegawai.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka menjadi ketertarikan penulis dalam meneliti terkait PENGARUH PROFESIONALISME KERJA DAN IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA LPP TVRI PUSAT JAKARTA.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perubahan status hukum TVRI dari masa ke masa berpengaruh pada dinamika kinerja dan pemantapan identitas TVRI sebagai TV publik secara baku, jelas dan konsisten.
2. Keberadaan TVRI sebagai TV publik belum optimal tercapai dikarenakan terdapatnya persoalan internal maupun eksternal yang menghambat kinerja TVRI.
3. TVRI kurang diminati sebagai media rujukan bagi masyarakat dikarenakan belum diperbaiki dan berkembangnya kinerja sebagai TV Publik.
4. Tidak berjalannya alur komunikasi antar struktur yang sehat dan sesuai prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku.
5. Para pegawai belum memiliki dedikasi kinerja yang lebih terhadap profesi sebagai pegawai pada lembaga publik.
6. Kinerja pegawai TVRI belum mengupayakan peningkatan kualitas kerja, menyebabkan belum tercapainya peningkatan kualitas layanan siaran TVRI.

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan lebih jelas, fokus dan terkontrol, serta adanya berbagai keterbatasan baik dari segi waktu, biaya maupun tenaga, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yakni mengetahui bagaimana kinerja pegawai

yang dipengaruhi oleh profesionalisme kerja dan iklim komunikasi organisasi pada LPP TVRI Pusat Jakarta.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh profesionalisme kerja terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI Pusat Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI Pusat Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh profesionalisme kerja dan iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI Pusat Jakarta?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh profesionalisme kerja terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI Pusat Jakarta.
2. Pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI Pusat Jakarta.
3. Pengaruh profesionalisme kerja dan iklim komunikasi organisasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai pada LPP TVRI Pusat Jakarta.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teroritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara maupun ilmu terkait lainnya, khususnya bidang Ilmu Komunikasi, Perilaku Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Penelitian dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti lain dalam melakukan tindakan penelitian sejenis pada masa selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal:

- a. Bagi pemerintah maupun instansi terkait: dapat menjadi evaluasi, pengembangan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan, khususnya terkait Penyiaran Publik dan Kepegawaian.
- b. Bagi LPP TVRI Pusat Jakarta: dapat menjadi evaluasi dan membantu dalam memahami profesionalisme kerja para pegawai dan iklim komunikasi lembaga berpengaruh terhadap kinerja di lingkungan TVRI Pusat Jakarta.
- c. Bagi masyarakat: dapat menjadi sumber wawasan yang memberikan gambaran dan pemahaman bagaimana kinerja pegawai serta pengaruhnya melalui profesionalisme kerja dan iklim komunikasi organisasi pada LPP TVRI Pusat Jakarta. Sehingga, masyarakat dapat melihat situasi dan kondisi yang sebenarnya.